BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat mengambil simpulan umum dan simpulan khusus mengenai "Partisipasi Warga Negara Pada Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kabupaten Subang" sebagai berikut.

1. Simpulan Umum

Dari pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan secara umum bahwa melalui pelaksanaan Musrenbang masyarakat dapat turut serta dalam proses pembuatan program ataupun kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kehendak mereka. Partisipasi warga negara dalam setiap tahapan perencanaan kegiatan pembangunan dapat memunculkan *sense of belonging* warga negara atau rasa memiliki terhadap setiap program pembangunan itu sendiri. Ketika masyarakat merasa memiliki terhadap program ataupun kebijakan pembangunan yang dibuat, maka mereka akan secara sukarela mendorong terealisasinya kebijakan tersebut dan dapat secara maksimum menikmati dan memanfaatkan hasil dari program pembangunan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya, masyarakat sebagai tujuan akhir dari pembangunan akan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu program ataupun kebijakan yang telah dibuat.

2. Simpulan Khusus

Disamping simpulan umum di atas, simpulan khusus dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Partisipasi warga negara pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) akan menunjukan tingkat dukungan warga negara terhadap kebijakan atau program pemerintah. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam penentuan program pemerintah menunjukan bahwa program tersebut diharapkan akan sesuai dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks partisipasi lokal bahwa semua pelaksana suatu program merupakan prasyarat murni, artinya pelaksana

suatu program harus memaksimumkan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum mereka.

b. Proses pelaksanaan Musrenbang yang dilakukan bertahap dari tingkat kelurahan sampai tingkat kabupaten. Usulan hasil pembahasan dari Musrenbang tahun ini akan direalisasikan menjadi sebuah program pembangunan di tahun berikutnya. Hasil dari Musrenbang tingkat kelurahan yang sudah ditampung kemudian akan dilaporkan ke tingkat kecamatan dan dibahas dalam Musrenbang tingkat kecamatan. Kemudian akan diadakan penunjukan perwakilan dari desa masing-masing untuk menjadi perwakilan di Musrenbang di tingkat kabupaten. Dari perwakilan yang telah ditunjuk tersebut harus mewakili berbagai unsur masyarakat, mulai dari Lembaga Pemberdayaan Masyrakat (LPM), tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta beberapa perwakilan dari pemerintah desa.

c. Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan bagi pemerintah maupun masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), meliputi: (1) faktor kurangnya pemahaman warga negara terhadap Musrenbang serta mekanisme pelaksanaannya (2) faktor kurangnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah mengenai pelaksanaan Musrenbang (3) keterbatasan waktu yang dimiliki oleh masyarakat yang sebagian besar merupakan buruh dan karyawan (4) adanya sinisme masyarakat terhadap pihak-pihak yang sering mendominasi suara dalam jalannya musyawarah (5) terdapat masyarakat yang masih apatis dan kurang yakin terhadap program pembangunan yang dibuat oleh pemerintah.

d. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi warga negara pada pelaksanaan Musrenbang salah satunya dengan cara pemerintah desa beserta tim penyelenggara Musrenbang melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat secara keseluruhan ke tiap-tiap RW. Selalu mengajak dan menginformasikan kepada masyarakat secara langsung dengan cara mengunjungi langsung rumah warga, mengikuti pertemuan rutin warga, dari acara tersebut diselipkan sosialisasi informasi

mengenai mekanisme pelaksanaan Musrenbang. Membangun pola komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat untuk menciptakan partisipasi sukarela dengan dilandasi rasa tanggung jawab dan keyakinan.

B. Implikasi

Mengkaji partisipasi warga negara dalam pelaksanaan musawarah perencanaan pembangungan merupakan bagian penting dari pembelajaran PKn karena berkaitan dengan dimensi pembelajaran PKn yang salah satunya adalah sosio-kultural. Pembelajaran PKn berbasis kemasyarakatan tersebut menjadi objek kajian yang menekankan pada tingkah laku warga negara, partisipasi warga negara, dan tanggung jawab warga negara. Hal ini sangat berkaitan sebagaimana gerakan *Community Civics* yang dipelopori oleh Dunn 1907 (Diamod dalam Ubaedillah, 2010, hlm.13). Gerakan *Community Civics* tersebut menjadi pelopor kajian PKn. Aspek yang dikaji meliputi keterlibatan masyarakat terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan sehari-hari dalam aspek sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Penelitian ini memberikan gambaran tentang partisipasi warga negara pada pelaksanaan Musrenbang, Diharapkan perannya bisa menjadi salah satu solusi untuk membina masyarakat dalam rangka penguatan dan pembentukan karakter bangsa yang partisipatoris.

C. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti mengajukan beberapa implikasi dan rekomendasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait ataupun untuk peneliti selanjutnya. Adapun rekomendasi yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

a. Pemerintah harus lebih memberikan ruang untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya dalam forum musyawarah.
b. Pemerintah harus lebih memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam tahap perencanaan pembangunan maupun dalam tahap realisasi suatu program pembangunan.

c. Pemerintah harus lebih banyak mengadakan sosialisasi informasi mengenai rencana program pembangunan agar terciptanya pemerintahan yang transparan.

2. Bagi Masyarakat

a. Berdasarkan penelitan yang peneliti lakukan, masyarakat dalam hal ini sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan sudah seharusnya berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pembangunan khususnya di daerah.
b. Masyarakat harus lebih menyadari bahwa kesejahteraan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu program maupun kebijakan dalam aspek pembangunan.
c. Sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya masyarakat berpartisipasi dalam setiap hal-hal yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup bangsa.

3. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia

Berdasarkan penelitan yang peneliti lakukan, terdapat peran strategis yang bisa dilakukan universitas terutama UPI sebagai salah satu lembaga pendidikan keguruan, sebagai berikut:

d. Memaksimalkan peran strategis UPI berdasarkan pada tridarma perguruan tinggi salah dalam aspek pengabdian
e. Lebih menekankan kembali partisipasi kegiatan mahasiswa yang juga mengarah langsung pada kegiatan masyarakat langsung. Hal itu untuk mendukung pembangunan masyarakat yang berdasarkan pada pendidikan.

4. Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan pengalaman peneliti menempuh pendidikan di Departemen PKn, ada hal yang perlu untuk dikembangkan lagi. Terutama kajian PKn yang bersifat kemasyarakatan, karena PKn berperan strategis dalam pendidikan moral dan karakter. Mengenai hal ini penulis merekomendasikan beberapa hal, yakni:

a. Adanya program binaan untuk desa ataupun lingkup masyarakat sebagai bentuk pengabdian yang berkelanjutan;
b. Menekankan kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian dan kajian PKn dalam konteks sosio-kultural

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian yang telah ada sudah selayaknya dapat dikembangkan melalui penelitian selanjutnya agar diperoleh kajian yang lebih mendalam mengenai masalah penelitian tersebut, maka rekomendasi yang diajukan untuk peneliti selanjutnya, yaitu:

a. Mengkaji lebih mendalam mengenai gerakan *community civic* dan dimensi kewarganegaraan dari aspek sosio-kultural;
b. Mengkaji kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kaitannya dengan partisipasi warga negara dalam pembangunan